

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2021

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memuat beberapa hal yang intinya adalah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIR HASBI, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19640406 199303 1 006

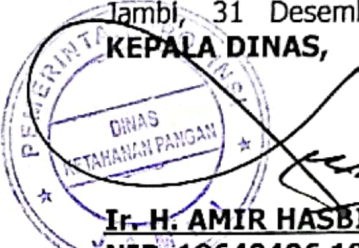
DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan Keuangan	5
 I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum.....	10
A.1. Profil dan Penjelasan Teknis.....	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
A.3. Basis Akuntansi	12
A.4. Dasar Pengukuran	12
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Asli Daerah	20
B.2. Belanja	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	31
C.4. Kewajiban	31
C.5. Ekuitas Dana	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	33
D.2. Pendapatan Transfer - LO	33
D.3. Beban Pegawai - LO.....	33
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	34
D.5. Pos Luar Biasa.....	34
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	35
E.1. Ekuitas Awal.....	35
E.2. Surplus(Defisit) LO	35
E.3. Ekuitas Akhir	35
E.4. Koreksi ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	35
E.5. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset tetap	35
E.6. Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	35
E.7. Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	35
E.8. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	35
E.9. Ekuitas Akhir	36
 VI. Penutup.....	37
Daftar Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
NIP. 19640406 199303 1 006

RINGKASAN

Laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar **Rp. 17.870.801.402,-** atau **93,43 %** dari yang dianggarkan dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yaitu sebesar **Rp. 19.127.070.545,00.-**
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD Per 31 Desember 2021. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp 4.519.654.071,-** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 0**, aset tetap sebesar **Rp. 4.407.654.071,-** dan aset lainnya sebesar **Rp.112.000.000. -**
3. Laporan Operasional menyajikan unsur pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Pendapatan – LO per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0** sementara jumlah beban sebesar **Rp. 17.135.420.473,36,-** sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar **Rp. 17.135.420.473,36,-**
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.223.570.115,75.**
5. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2021 dengan realisasinya , yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021.

Realisasi Anggaran Pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 17.870.801.402,-** atau **93,43%** dari anggarannya sebesar **Rp. 19.127.070.545,00,-** Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2021

Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
BELANJA OPERASI	18.642.623.625,00	17.389.778.919	93,28
- Belanja Pegawai	9.858.902.279,00	9.111.387.895	92,42
- Belanja Barang dan Jasa	5.964.385.566	5.489.253.524	92,03
- Belanja Bantuan Sosial	2.819.335.780	2.789.137.500	98,93
BELANJA MODAL	484.446.920	481.022.483	99,29
- Belanja Modal	484.446.920	481.022.483	99,29
Jumlah	19.127.070.545,00	17.870.801.402	93,43

Sumber : Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan Th.2021

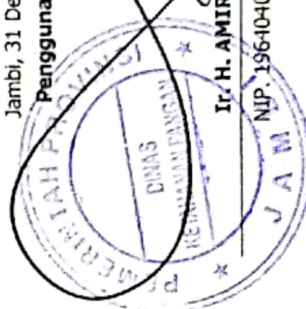


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Usuran Pemerintahan : 2		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.03		Pangan			
Unit Organisasi : 2.03.01		Dinas Ketahanan Pangan			
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01		Dinas Ketahanan Pangan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	19.127.070.545,00	17.870.801.402,00	93,43	12.031.852.293,80
5.1	BELANJA OPERASI	18.642.623.625,00	17.389.778.919,00	93,28	11.964.684.429,80
5.1.1	Belanja Pegawai	9.858.902.278,20	9.111.387.895,00	92,42	9.124.510.021,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.964.385.566,80	5.489.253.524,00	92,03	2.840.174.408,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.819.335.780,00	2.789.137.500,00	98,93	0,00
5.2	BELANJA MODAL	484.446.920,00	481.022.483,00	99,29	67.167.864,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.446.920,00	481.022.483,00	99,29	67.167.864,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(19.127.070.545,00)	(17.870.801.402,00)	93,43	(12.031.852.293,80)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(19.127.070.545,00)	(17.870.801.402,00)	93,43	(12.031.852.293,80)

Jambi, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran


Ir. H. AMIR HASBI, ME
NIP. 196404061993031006

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 2.231.680.301,75** dibanding dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 1.495.198.203,11**.

Aset tersebut adalah terdiri dari aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 1.268.730.549** terdiri dari Kas sebesar **Rp 0** Piutang lain-lain sebesar **Rp.0** dan Persediaan sebesar **Rp. 1.268.730.549**.

Aset tetap per 31 desember 2021 adalah sebesar **Rp. 962.949.752,75** terdiri dari tanah **Rp. 0** Peralatan dan Mesin **Rp 3.724.997.571** Gedung dan Bangunan **Rp. 625.855.000** Jalan, Jaringan dan Irigasi **RP. 55.051.500** Aset Tetap Lainnya **Rp. 1.750.000** dengan Akumulasi Penyusutan sebesar **(Rp. 3.444.704.318,25)**

Serta Aset Lainnya Sebesar **Rp. 112.000.000** yang terdiri dari Aset Lain-lain sebesar **Rp. 112.000.000**



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.268.730.549,00	405.228.605,23
JUMLAH ASET LANCAR	1.268.730.549,00	405.228.605,23
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.724.997.571,00	3.645.896.388,00
Gedung dan Bangunan	625.855.000,00	625.855.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.051.500,00	55.051.500,00
Aset Tetap Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.444.704.318,25)	(3.238.583.290,12)
JUMLAH ASET TETAP	962.949.752,75	1.089.969.597,88
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	112.000.000,00	112.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
 Unit Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	2.231.680.301,75	1.495.198.203,11
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Sisa Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	8.110.186,00	7.009.016,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.110.186,00	7.009.016,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	8.110.186,00	7.009.016,00
EKUITAS		
EKUITAS	2.223.570.115,75	1.488.189.187,11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.231.680.301,75	1.495.198.203,11

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Menyajikan berbagai unsur Pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.0** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp. 17.135.420.473,36** yang terdiri dari beban Pegawai **Rp. 9.111.387.895,** beban barang dan jasa **Rp. 5.028.774.050,23,** Beban Bantuan Sosial **Rp. 2.789.137.500,** Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin **Rp. 192.227.640,62,** Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan **Rp. 12.517.100,** Serta Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp. 1.376.287,51.** Sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar **Rp. 17.135.420.473,36**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.03 Unit Organisasi : 2.03.01 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan					
NO. URUT	URAIAN					SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)		
7	KEGIATAN OPERASIONAL										
7.1	PENDAPATAN - LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1.1	Pajak Daerah-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1.2	Retribusi Daerah-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3.2	Dana Darurat-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO					0,00	0,00	0,00	0,00		
8	BEBAN					17.135.420.473,36	12.150.372.037,34	4.985.048.436,02	41,03		
8.1.1	Beban Pegawai					9.111.387.895,00	8.936.602.021,80	174.785.873,20	1,96		
8.1.2	Beban Barang dan Jasa					5.028.774.050,23	2.885.416.598,75	2.143.357.451,48	74,28		
8.1.3	Beban Bunga					0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.4	Beban Subsidi					0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.5	Beban Hibah					0,00	119.994.930,00	(119.994.930,00)	(100,00)		
8.1.6	Beban Bantuan Sosial					2.789.137.500,00	0,00	2.789.137.500,00	0,00		
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang					0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.8	Beban Lain-lain					0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin					192.227.640,62	191.978.735,29	248.905,33	0,13		
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan					12.517.100,00	12.517.100,00	0,00	0,00		
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi					1.376.287,51	1.376.287,50	0,01	0,00		
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya					0,00	2.486.364,00	(2.486.364,00)	(100,00)		
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya					0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud					0,00	0,00	0,00	0,00		

Urusan Pemerintahan : 2
 Bidang Pemerintahan : 2.03
 Unit Organisasi : 2.03.01
 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Pangan
 Dinas Ketahanan Pangan
 Dinas Ketahanan Pangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.135.420.473,36)	(12.150.372.037,34)	(4.985.048.436,02)	41,03
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.135.420.473,36)	(12.150.372.037,34)	(4.985.048.436,02)	41,03
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.135.420.473,36)	(12.150.372.037,34)	(4.985.048.436,02)	41,03

Jambi, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran



Ir. H. AMIR HASBI, ME

NIP. 196404061993031006

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp Rp. 1.488.189.187,11** dikurangi defisit LO sebesar **Rp. 17.135.420.573,36** kemudian ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai **Rp 17.870.801.402** sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 desember 2021 adalah **Rp. 2.223.570.115,75**.

Catatan atas laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas termasuk pula dalam Calk adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan perubahan Ekuitas tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

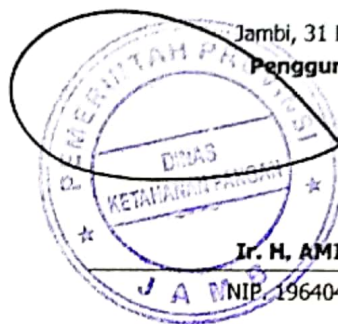
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Pangan		
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan		
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.488.189.187,11	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.135.420.473,36)	(12.150.372.037,34)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.870.801.402,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.223.570.115,75	(12.150.372.037,34)

Jambi, 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran

Ir. H. AMIR HASBI, ME
NIP. 196404061993031006



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang sebelumnya adalah Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi di bentuk pada Tahun 2001 yaitu setelah keluarnya Undang- undang No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Pada Tahun 2009 berubah menjadi Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 10 Noveber 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2011 berubah menjadi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan salah satu unsur Pendukung pemerintah Provinsi Jambi Khususnya di Bidang Ketahanan Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pangan, yaitu ; **"Menjadi Institusi yang prima dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, dengan sasarannya :**

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
2. Penguatan Cadangan Pangan.
3. Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan.
4. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.

5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal.
6. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Sayur dan Buah.

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diuraikan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ketahanan Pangan.
2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Ketahanan Pangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Subbag. Perencanaan dan Evaluasi
 - Subbag Umum
3. Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
 - Subbag Umum UPTD
 - Seksi Pelayanan Teknis UPTD
 - Seksi Pengujian Sertifikasi UPTD
4. Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Seksi Konsumsi Pangan
 - Seksi Pengankaramanan Konsumsi Pangan
 - Seksi Keamanan Pangan
5. Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - Seksi Ketersediaan Pangan
 - Seksi Sumber daya Pangan
 - Seksi Kerawanan Pangan
6. Kabid. Distribusi dan cadangan Pangan
 - Seksi Distribusi Pangan
 - Seksi Harga Pangan
 - Seksi Cadangan Pangan

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Simda yaitu serangkaian Prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah.

Simda terdiri Simda Keuangan dan Simda Barang Milik Daerah. Simda Keuangan berbasis akrual dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA Barang Milik Daerah adalah sistem yang menghasilkan asset tetap , persediaan, dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang Milik Daerah.

A.3 Basis Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas Adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau di bayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan atau uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan Praktek-praktek spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :
 - diterima di rekening Kas umum daerah atau
 - diterima oleh SKPD atau
 - diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasi ,yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya.
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran BUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari BUD
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Setda Provinsi Jambi.
- Belanja di sajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di catatan atas laporan keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam proses laporan yang menurunkan ekuitas,yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi atau fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber –sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya ala seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya :

a. Aset Lancar

- Aset Lancar Mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas piutang , dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca,
- Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbulnya berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan Jatuh Tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar Tagihan TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan :
 - harga pembelian terakhir ,apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau Estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/Rampasan.

b. Aset tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan oleh raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) .
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Pengeluaran yang tidak mencakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas ,diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset lainnya

Aset lainnya adalah Aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun , Kemitraan dengan Pihak ketiga, Dana yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak berwujud dan Aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang di miliki.

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atas digunakannya untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain-lainnya merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lainnya dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam Konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, utang bunga (accrued interest) dan Utang Jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas dana lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(8) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - ✓ Tanah
 - ✓ Konstruksi dalam pengerjaan

- ✓ Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan /using yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- ✓ Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ✓ Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah atau lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada periode 31 Desember 2021 adalah **Rp. 0.**

B.2. Belanja

Jumlah total anggaran belanja Tahun 2021 yang dialokasikan pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dianggarkan adalah sebesar **Rp. 19.127.070.545,00.** Jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2020 yakni sebesar **Rp. 12.709.650.299,30** naik sebesar **66,45%.**

Alokasi anggaran belanja TA. 2021 tersebut terdiri dari ; Alokasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 18.642.625.424,63** jika dibandingkan TA. 2020 yakni Belanja Operasi sebesar **Rp. 12.632.002.712,30** terjadi peningkatan pada Belanja Operasi sebesar **67,76 %.**

Alokasi Belanja Modal TA. 2021 sebesar **Rp. 484.446.920** jika dibandingkan TA. 2020 yakni Alokasi Belanja Modal sebesar **Rp. 77.647.587** Terjadi peningkatan pada Belanja Modal sebesar **16,03 %.**

Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 dan TA. 2020 dirinci dengan alokasi anggaran dan realisasinya masing-masing sebagai berikut :

Tabel.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	TA. 2021		TA. 2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi				
- Belanja Pegawai	9.858.902.279,00	9.111.387.895,00	9.541.013.345,80	8.936.602.021,80
- Belanja Barang dan Jasa	5.964.385.566,00	5.489.253.524,00	3.090.989.366,50	3.028.082.408,00
- Belanja Bantuan Sosial	2.819.335.780,00	2.789.137.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal				
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.446.920,00	481.022.483,00	77.647.587,00	67.167.864,00
JUMLAH	19.127.070.545,00	17.870.801.402,00	12.709.650.299,30	12.031.852.293,80

Suber ; Data Olahan tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dari data rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut diuraikan menjadi Belanja Modal dan Belanja Operasi:

- **Belanja Modal**

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 481.022.483** atau **99,29%** dari Anggaran sebesar **Rp. 484.446.920,-**

Tabel.3. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Modal	484.446.920	481.022.483	99,29
Jumlah	484.446.920	481.022.483	99,29

Sumber ; Data Olahan dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

- **Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 17.389.778.919,00** atau mencapai **93,28 %** dari anggarannya yaitu sebesar **Rp. 18.642.623.625,00** dengan rincian belanja terdiri dari

Tabel.4. Belanja Operasional per 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	9.858.902.279,00	9.111.387.895	92,42
Belanja Barang dan Jasa	5.964.385.566,00	5.489.253.524	92,03
Belanja Bantuan Sosial	2.819.335.780	2.789.137.500	98,93
Jumlah	18.642.623.625,00	17.389.778.919	93,28

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA. 2021

Belanja langsung tersebut jika dijabarkan menurut Kegiatannya dengan rincian alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel.5. Realisasi Belanja kegiatan Perencanaan,Penganggaran, Evaluasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	20.280.000	20.280.000	100
Belanja Barang dan Jasa	363.124.863	331.715.900	91,35
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	383.404.763	351.995.900	91,81

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel.6, Realisasi Belanja kegiatan Administrasi Keuangan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	9,734,222,278,63	8,987,107,895,00	92,32
Belanja Barang dan Jasa	163,502,000,00	163,300,000,00	99,88
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	9,897.724.278,63	9.150.407.895,00	92,45

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel.7, Realisasi Belanja Kegiatan Administrasi Kepegawaian

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	16,500,000	16,500,000	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	16.500.000	16.500.000	100

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel.8, Realisasi Belanja Kegiatan Administrasi Umum

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	473,513,197	471,732,363	99,62
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	473.513.197	471.732.363	99,62

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel.9, Realisasi Belanja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	261,840,516	249,916,800	95,45
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	261.840.516	249.916.800	95,45

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel.10. Realisasi Belanja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	320.954.800	314.689.921	98,05
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	320.954.800	314.689.921	98,05

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

7 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

Tabel.11. Realisasi Belanja Kegiatan Penyediaan Infrastruktur

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	56.640.000	56.640.000	100
Belanja Barang dan Jasa	473.856.600	467.893.000	98,74
Belanja Bantuan Sosial	2.819.335.780	2.789.137.500	98,93
Jumlah	3.349.832.380	3.313.670.500	98,92

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

8 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Tabel.12. Realisasi Belanja Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	21.720.000	21.320.000	98,16
Belanja Barang dan Jasa	1.500.467.595	1.499.443.610	99,93
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	1.522.187.595	1.520.763.610	99,91

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

9 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Tabel.13. Realisasi Belanja Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	1.394.240.409	1.394.166.365	99,99
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	1.394.240.409	1.394.166.365	99,99

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

10 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Tabel.14. Realisasi Belanja Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	69.358.000	69.358.000	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	69.358.000	69.358.000	100

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

11 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Tabel.15. Realisasi Belanja Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	144.600.152	144.366.152	99,84
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	144.600.152	144.366.152	99,84

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

12 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

Tabel.16. Realisasi Belanja Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi Jambi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	72.394.080	72.391.600	99,99
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	72.394.080	72.391.600	99,99

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

13 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

Tabel.17. Realisasi Belanja Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	114.126.500	114.011.201	99,90
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	114.126.500	114.011.201	99,90

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

14 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tabel.18. Realisasi Belanja Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	26.040.000	26.040.000	100
Belanja Barang dan Jasa	595.908.754	179.768.612	30,17
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah	621.948.754	205.808.612	33,09

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2021

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Posisi Neraca pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi secara umum untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 2.231.680.301,75** dibandingkan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar **Rp. 1.495.198.203,11.**

Jumlah tersebut terdiri dari; Aset Lancar sebesar **Rp. 1.268.730.549** Aset Tetap sebesar **Rp. 962.949.752,75.**

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 2.223.570.115,75** tetap jika dibanding per 31 Desember 2020 yaitu sebesar **Rp. 1.487.689.253,11.**

C.1. Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Persediaan

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL).**

b. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank saldo, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut.

Besarnya Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah. Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2020 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

d. Kas Lainnya.

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp .0, (NIHIL)** meliputi Surat-surat berharga.

e. Piutang Pajak

Piutang Pajak secara total per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

f. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi secara total per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

g. Piutang Lain-lain

Piutang lainnya / Piutang Bukan Pajak secara total per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

h. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lainnya PAD yang Sah secara total per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0, (NIHIL)**

i. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 1.268.730.549,** meliputi cadangan pangan di Bulog berupa beras dan alat tulis kantor.

Untuk nilai Persediaan tersebut diatas belum tercatat seluruhnya, masih ada nilai persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dan peralatan laboratorium yang belum tercatat dan dimasukkan kedalam persediaan. Hal tersebut dikarenakan dalam penginputan pada SIPD dan SSH yang seharusnya barang-barang tersebut masuk dalam kelompok barang persediaan pakai habis dan tidak termasuk dalam kelompok Belanja Modal sebesar Rp. 401.921.300.- rincian sebagai berikut ;

1.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (Peralatan Pengolahan Demplot))	Rp.	18.590.000.-
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (PAlat Pemasaran, Pupuk, Kompos, Mulsa, Peralatan Media Tanam dan Sarana Pendukung Lainnya Pembibitan, Peralatan Pengolahan Demplot,))	Rp.	361.208.100.-
3.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (Kayu Reng))	Rp.	5.623.200.-
	JUMLAH	Rp.	385.421.300.-
4.	Belanja Modal Alat Laboratoritum Lain (Belanja Habis Pakai : Reagen Formalin)	Rp.	16.500.000.-
	TOTAL	Rp.	401.921.300.-

Dari penjelasan diatas, seharusnya jumlah total persediaan semula dari **Rp 1.268.730.549,-** ditambah **Rp. 401.921.300** sehingga jumlah total persediaannya adalah menjadi sebesar **Rp. 1.670.651.849.-**

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp.962.949.752,75.-** dari Nilai Aset Tetap pada 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 1.089.969.597,88.-**

Posisi aset tetap dapat dilihat di bawah ini :

a. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- atau sama dengan tahun sebelumnya.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.724.997.571,- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.645.896.388,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 79.101.183,- atau 2,12% dari anggarannya.

Untuk nilai Peralatan dan Mesin tersebut diatas terapat selisih antara Neraca dan LRA. Hal tersebut dikarenakan dalam penginputan pada SIPD dan SSH yang seharusnya barang-barang tersebut masuk dalam kelompok barang persediaan pakai habis dan tidak termasuk dalam kelompok Belanja Modal sebesar Rp. 401.921.300,- rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Berdasarkan Neraca		Mutasi dari Tahun 2021 ke 2020	Berdasarkan LRA	Selisih
1.	Peralatan dan Mesin	3.724.997.571,-	3.645.896.388,-	79.101.1183,-	481.022.483,-	401.921.300,-

Penjelasan:

Nilai selisih tersebut diatas sebesar Rp. 401.921.300,- tersebut adalah barang yang seharusnya tercatat masuk kedalam persediaan yang akan diserahkan kepada msyarakat dan peralatan laboratorium (barang pakai habis).

Hal tersebut dikarenakan dalam penginputan pada SIPD dan SSH yang seharusnya barang-barang tersebut masuk dalam kelompok barang persediaan pakai habis dan tidak termasuk dalam kelompok Belanja Modal sebesar Rp. 401.921.300,- dan nilai tersebut seharusnya sudah tercatat dan terinput kedalam barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, Adapun rincian barang tersebut sebagai berikut ;

1.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (Peralatan Pengolahan Demplot))	Rp.	18.590.000.-
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (PAlat Pemasaran, Pupuk, Kompos, Mulsa, Peraltan Media Tanam dan Sarana Pendukung Lainnya Pembibitan, Peralatan Pengolahan Demplot,))	Rp.	361.208.100.-
3.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan (Keg. Pekarangan Pangan Lestari : (Kayu Reng))	Rp.	5.623.200.-
	JUMLAH	Rp.	385.421.300.-
4.	Belanja Modal Alat Laboratoritum Lain (Belanja Habis Pakai : Reagen Formalin)	Rp.	16.500.000.-
	JUMLAH	Rp.	401.921.300.-

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 625.855.000.- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 625.855.000.- atau sama dengan tahun lalu.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 55.051.500.- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 55.051.500.- atau sama dengan tahun lalu.

f. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.750.000.- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.750.000.- atau sama dengan tahun lalu.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- atau sama dengan tahun lalu.

h. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (3.444.704.318,25),- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (3.238.583.290,12),-.

C.3. Aset Lainnya

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 112.000.000.- terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang
Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021, adalah sebesar Rp. 0,- atau sama dengan tahun lalu.
- b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021, adalah Sebesar Rp. 0.- atau sama dengan tahun lalu.
- d. Aset Tak Berwujud
Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021, adalah sebesar Rp. 0.- atau sama dengan tahun lalu.
- e. Aset Lain-lain
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 112.000.000.- dan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 112.000.000,- atau sama dengan tahun lalu yang merupakan aset rusak berat dan penghapusannya masih dalam proses.

C.4. Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek;
Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 8.110.186 terdiri dari : Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,-(Nihil), Utang Bunga sebesar Rp. 0,-(Nihil), Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp. 0,-(Nihil), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-(Nihil), Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp. 0,-(Nihil), Utang Belanja Sebesar Rp. 8.110.186 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 0,-(Nihil). Di bandingkan kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.508.950.-
- b. Kewajiban Jangka Panjang;
Nilai kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0, (Nihil), yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0.- (Nihil).-

C.5. Ekuitas Dana

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.223.570.115,75 dan jika dibandingkan ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.487.689.253,11.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2021 .

- 1.1. Pajak Daerah - LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 Pendapatan retribusi daerah - LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.
- 1.2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00
- 1.3. Lain-lain PAD yang Sah - LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00

D.2. Pendapatan Transfer - LO

- 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat - LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.
- 2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

D.3. Beban Pegawai - LO

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 masing –masing sebesar Rp. 9.111.387.895 dan Rp. 8.936.602.021,80. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.19. Kondisi Beban Pegawai per 31 Desember

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Beban Pegawai	9.111.387.895	8.936.602.021,80
Jumlah	9.111.387.895	8.936.602.021,80

Sumber ; Data Olahan dan APBD Dinas Ketahanan Pangan TA.2020 dan TA.2021

Beban pegawai per 31 Desember 2021, dimaksud terdiri dari :

Tabel.20. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021

Beban Pegawai per 31 Desember 2021	
Gaji dan Tunjangan	
- Gaji Pokok ASN	3.882.022.200
- Tunjangan Keluarga ASN	347.443.234
- Tunjangan Jabatan ASN	204.860.000
- Tunjangan Fungsional ASN	145.510.000
- Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.235.000
- Tunjangan Beras ASN	194.447.700
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.431.206
- Pembulatan Gaji ASN	51.276
- Iuran Jaminan Kesehatan ASN	340.736.340
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.993.937
- Iuran Jaminan Kematian ASN	23.982.114
Tambahan Penghasilan PNS	
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.601.074.888
Honorarium	
- Honorarium	245.600.000

Sumber ; Data Olahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa pada Tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 5.028.774.050,23,- dan Rp 2.885.416.598,75

Beban barang dan jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa - LO pada 31 Desember 2021 sebesar **Rp.0,- (Nihil)**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 1.488.189.187,11.

E.2. Surplus / Defisit - LO

Nilai Surplus -LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.135.420.473,36. Defisit - LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir lainnya pada periode pada 31 Desember 2021 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp. 2.223.570.115,75 dan Rp 1.487.689.253,11

E.4. Koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap.

Nilai Koreksi Ekuitas penyesuaian aset tetap pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

E.5. Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap.

Nilai Koreksi Ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0

E.6. Koreksi ekuitas penyesuaian aset Lainnya.

Nilai Koreksi Ekuitas penyesuaian aset tetap pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

E.7. Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Nilai Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terbilang **Nihil**.

E.8. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.870.801.402.

E.9. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.2.223.570.115,75 dan Rp. 1.487.689.253,11

VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Keuangan TA. 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini kami harapkan dapat dijadikan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan merupakan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAERAH
BERITA ACARA REKONSILIASI**

ANTARA : BADAN KEUANGAN DAERAH (Bidang Akuntansi dan Pelaporan)
DENGAN : Dinas Ketahanan Pangan

Pada hari Selasa Tanggal 25 Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (25/01/2022) telah dilakukan rekonsiliasi belanj Semester II Tahun 2021 antara Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi dengan Ketahanan Pangan Dengan hasil sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BELANJA)

NO	URAIAN	LRA BELANJA (SIMDA)	Data Menurut Dinas Ketahanan Pangan	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
	BELANJA	17.870.801.402,00	17.870.801.402,00	-
	BELANJA OPERASI	17.389.778.919,00	17.389.778.919,00	-
	Belanja Pegawai	9.111.387.895,00	9.111.387.895,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	5.489.253.524,00	5.489.253.524,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	2.789.137.500,00	2.789.137.500,00	-
	BELANJA MODAL	481.022.483,00	481.022.483,00	-
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	481.022.483,00	481.022.483,00	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.870.801.402,00)	(17.870.801.402,00)	-
	STOK LERIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLIPA)	(17.870.801.402,00)	(17.870.801.402,00)	-

2. NERACA

NO	URAIAN	NERACA (SIMDA)	Data Menurut Dinas Ketahanan Pangan	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	ASET			
	ASET LANCAR			
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
3	Kas di BLUD	-	-	-
4	Kas Dana BOS	-	-	-
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-
6	Kas Lainnya	-	-	-
7	Setara Kas	-	-	-
8	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
9	Piutang Pajak Daerah	-	-	-
10	Piutang Retribusi Daerah	-	-	-
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-	-
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
14	Piutang Lainnya	-	-	-
15	Penyisihan Piutang	-	-	-
16	Beban Dibayar di Muka	-	-	-
17	Perediaan	1.268.730.549,00	1.268.730.549,00	-
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-
19	JUMLAH ASET LANCAR (1 sd 18)	1.268.730.549,00	1.268.730.549,00	-
	INVESTASI JANGKA PANJANG			
	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	-	-	-
20	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-
21	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-
22	Investasi dalam Obligasi	-	-	-
23	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-
24	Dana Bergulir	-	-	-
25	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Investasi Non Po	-	-	-
26	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-
27	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
28	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-
29	Penyertaan Modal	-	-	-
30	Investasi -Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
31	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (29 s	-	-	-
32	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (28+31)	-	-	-
	ASET TETAP			
33	Tanah	-	-	-
34	Peralatan dan Mesin	3.724.997.571,00	3.724.997.571,00	-
35	Gedung dan Bangunan	625.855.000,00	625.855.000,00	-
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.051.500,00	55.051.500,00	-
37	Aset Tetap Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
39	Akumulasi Penyusutan	(3.444.704.318,25)	(3.444.704.318,25)	-

40	JUMLAH ASET TETAP (33 sd 39)	962.949.752,75	962.949.752,75	-
	DANA CADANGAN	-	-	-
41	Dana Cadangan	-	-	-
42	JUMLAH DANA CADANGAN (41 sd 41)	-	-	-
	ASET LAINNYA	-	-	-
43	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
45	Aset Tidak Berwujud	112.000.000,00	112.000.000,00	-
46	Aset Lain-lain	-	-	-
47	Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	(112.000.000,00)	(112.000.000,00)	-
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
49	JUMLAH ASET LAINNYA (43 sd 48)	2.231.680.301,75	2.231.680.301,75	-
50	JUMLAH ASET (19 + 32 + 40 + 42 + 49)	-	-	-
	KEWAJIBAN	-	-	-
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
52	Utang Bunga	-	-	-
53	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-
54	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
55	Pendapatan Diterima Dimuka	8.110.186,00	8.110.186,00	-
56	Utang Belanja	-	-	-
57	R/K PPKD	8.110.186,00	8.110.186,00	-
58	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (51 sd 57)	-	-	-
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
59	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
60	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-
61	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
62	Utang Kepada Masyarakat	-	-	-
63	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (59 sd 62)	8.110.186,00	8.110.186,00	-
64	JUMLAH KEWAJIBAN (58 + 63)	-	-	-
		2.223.570.115,75	2.223.570.115,75	-
65	EKUITAS	-	-	-
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (64 + 65)	2.231.680.301,75	2.231.680.301,75	-



PPK Dinas Ketahanan Pangan
 H. Arsyad Nur, M.Si
 NIP. 196609011992021001



KEPALA SUB BIDANG
 AKUNTANSI BELANJA

Eka Nopriyanti, S.E., M.P.
 NIP. 1985100219801010000



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KETAHANAN PANGAN
 Jl. Sekeloa Timur Jambi No 1000 Telp (0711) 42475 Fax 41751

BERTA ACARA

REKONSILIASI AKUNTANSI EKSPANSI GABUNG
 SUBSIDIS 1 TAHUN 2021

Berita Acara ini dibuat sebagai bukti bahwa pada tanggal 10 Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan Revisi
 (Tahap Revisi) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jambi bersama dengan Revisi Anggaran Belanja Dinas KETAHANAN PANGAN Provinsi
 Jambi telah dilaksanakan berdasarkan hasil Revisi Anggaran Belanja Dinas KETAHANAN PANGAN Provinsi Jambi dan Revisi
 Revisi Anggaran Semester I Tahun 2021 dengan data berikut sebagai berikut :

NO	Uraian BMD	ALY BMD	NERACA BARANG SELUR GABUNG OPD	NERACA KEJAMBAHAN	KETERANGAN Dokumen
1	Tanah	-	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	1.287	3.724.887.871,00	3.724.887.871,00	Lengkap
3	Gedung dan Bangunan	2	825.855.000,00	825.855.000,00	Lengkap
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2	85.051.500,00	85.051.500,00	Lengkap
5	Aset Tetap Lainnya	1	1.730.000,00	1.730.000,00	Lengkap
6	Konstruksi dalam pekerjaan	-	-	-	
7	Aset Lainnya	9	112.000.000,00	112.000.000,00	Lengkap
	Jumlah	1.281	4.519.854.071,00	4.519.854.071,00	Lengkap
8	Akumulasi Penyusutan		1.554.734.318,25	1.554.734.318,25	Lengkap
9	Akumulasi Amortisasi ATB				
10	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya				

Demikian berita acara rekonsiliasi ini kami buat dengan sesungguhnya dan di tandatangani.

Pihak Kedua
 Kabid Pengelolaan BMD

Pihak Pertama
 Penguser Barang Pengguna

Pulimatriso, S.E.MAP
 Pembina
 NIP.19780108200804 1 011

Imasryah, SE
 Penata Tk.I
 NIP.196907291992032003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertameng dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Dra. Emita
NIP : 19860704 199303 2 004
Jabatan : Pengendali Teknis
2. Nama Lengkap : Feri Febriandi, SE
NIP : 19820218 200903 1 003
Jabatan : Ketua Tim
3. Nama Lengkap : Hj. Ely Nurdewi, SH
NIP : 19850511 190009 2 001
Jabatan : Anggota Tim
4. Nama Lengkap : Sustini, S.Th.MPd. ME
NIP : 19810703 200801 2 004
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 090/518/SPT/ITPROV-1.1/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 setelah memperlihatkan surat bukti kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Nurpita Sari, SE
NIP : 19860622 201001 2 009
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

Yang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 19/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.3/2021 tanggal 4 Januari 2021 ditugaskan sebagai Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang pakai habis serta pengecekan langsung barang yang ada ditemui kenyataan sebagai berikut (Terlampir) :

Tim Pemeriksa :

Tanda Tangan



Pengurus Barang Pembantu

Nurpita Sari, SE
Nip.19860622 201001 2 009

TIM PEMERIKSA

1. Nama : Dra. Emita
NIP : 19860704 199303 2 004
2. Nama : Feri Febriandi, SE
NIP : 19820218 200903 1 003
3. Nama : Hj. Ely Nurdewi, SH
NIP : 19850511 190009 2 001
4. Nama : Sustini, S.Th.MPd.ME
NIP : 19810703 200801 2 004

1.

2.

3.

4.

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BALDO PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2021

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	A/T	2.025	Rp. 5.141.000
2	Bahan Kebersihan	-	-
3	Obat-obatan	-	-
4	Buku	-	-
5	Bahan Makanan	117.445	Rp. 1.263.589.549
6	Bahan Kimia	-	-
7	Pupuk	-	-
8	Alat Bengkel	-	-
9	Bahan Bangunan	-	-
10	Sandang Pangan	-	-
11	Alat	-	-
12	Alat Listrik	-	-
13	Aset Yang akan Diserahkan Pada Pihak ke Tiga	-	-
Total		119.470	1.268.730.549

Jambi, 31 Desember 2021

Tim Inspektorat

1. Dra. Emilia
19880704 199303 2 004
Pengendali Teknis
2. Feri Febrland, S.E.
19820218 200903 1 003
Ketua Tim
3. H. Elly Nurdiawati, S.H
19650511 190009 2 001
Anggota
4. Susanti, S.Th., N.Pd., M.E
19810703 200801 2 004
Anggota

Mengetahui:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi

Ir. H. Amr Hasbi, M.E
Pembina utama madya
NIP. 196404061993031006

PENGURUS BARANG PEMBANTU

Nurpita Seri, SE
NIP. 198606222010012009

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama : Dra. Ernita | 4. Nama : Sustini, S.Th.M.Pd, ME |
| NIP : 19660704 199303 2 004 | NIP : 19810703 200801 2 004 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Feri Febriandi, SE | |
| NIP : 19820218 200903 1 003 | |
| Jabatan : Ketua Tim | |
| 3. Nama : Hj. Ellya Nurdewi, S.H | |
| NIP : 19650511 190009 2 001 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Jambi Nomor : 090/518/SPT/ITPROV-1.1/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021, setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Linda Martini, SP
NIP : 19680314 200012 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

yang dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 5 /KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2021 tanggal 4 Januari Tahun 2021 ditugaskan pengurusan/pengelolaan uang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan/pengelolaan ini ditemui sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	0,00
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp	0,00
c. Saldo Bank	Rp	0,00
d. Perangko, Materai dan surat berharga yang diizinkan	Rp	0,00
Total	Rp	0,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp	0,00
Selisih kurang antara saldo Kas & Buku	Rp	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN,


LINDA MARTINI, SP

NIP. 19680314 200012 2 003



TIM PEMERIKSA

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama : Dra. Ernita | () |
| NIP : 19660704 199303 2 004 | |
| 2. Nama : Feri Febriandi, SE | () |
| NIP : 19820218 200903 1 003 | |
| 3. Nama : Hj. Ellya Nurdewi, SH | () |
| NIP : 19650511 190009 2 001 | |
| 4. Nama : Sustini, S.Th.MPd.ME | () |
| NIP : 19810703 200801 2 004 | |

Pemeriksaan ini memberikan pandangan sebagai berikut

1. Keterangan tentang perbedaan kas : Nihil
2. Tempat penyimpanan uang : 1) Bank Jambi Rekening Nomor 3001033584
2) Brankas Merek Cobra
3. Tempat penyimpanan kunci kedua : -
4. Catatan tentang mengerjakan buku : BKU dikerjakan Bendahara Pengeluaran dengan SIMDA
5. Catatan tentang penutupan Buku Kas : BKU sudah ditutup setiap akhir bulan Umum menurut peraturan yang telah Ditetapkan dan keterangan-keterangan Yang dilukiskan oleh Bendahara
6. Pemeriksaan kas yang terakhir dikerja : Sudah dilakukan pemeriksaan kas oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran/Pengguna Anggaran.
7. Pertelaahan tentang terdapatnya surat : -
berharga
8. Catatan tentang penyetoran penerimaan :
PPN/PPH ke Kas Negara.

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
1	PPh 21	39.579.000	39.579.000	0,00
2	PPh 22	3.742.115	3.742.115	0,00
3	PPh 23	6.282.154	6.282.154	0,00
4	PPH Final Ps 4 (2)	0,00	0,00	0,00
5	PPn	36.445.878	36.445.878	0,00
Jumlah		86.049.147	86.049.147	0,00

9. Hal-hal lain untuk mempertimbangkan :

BENDAHARA PENGELUARAN,


LINDA MARTINI, SP

NIP. 19680314 200012 2 003



TIM PEMERIKSA

1. Nama : Dra. Emita
NIP : 19660704 199303 2 004
2. Nama : Feri Febriandi, SE
NIP : 19820218 200903 1 003
3. Nama : Hj. Ellya Nurdewi, SH
NIP : 19650511 190009 2 001
4. Nama : Sustini, S.Th, MPd, ME
NIP : 19810703 200801 2 004

()
()
()
()

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas : 31 Desember 2021
Nama Penutup kas : Linda Martini, SP

Tanggal penutupan kas yang lalu : 31 Desember 2021

Jumlah penerimaan mulai dari 1 Januari s.d Desember 2021	: Rp. 22.405.144.921,-
Jumlah pengeluaran mulai dari 1 Januari s.d Desember 2021	: <u>Rp. 22.405.144.921,-</u>
Saldo Buku	Rp. 0,00,-
Saldo Kas	Rp. 0,00,-

Terdin dari :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Lembaran uang kertas Rp. 100.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 50.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 20.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 10.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 5.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 1.000,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 500,- | x - Lembar Rp. 0 |
| Lembaran uang kertas Rp. 100,- | x - Lembar <u>Rp. 0</u> |
| | Rp. 0 |
| 2. Uang logam Rp. 500,- | x - Keping Rp. 0 |
| Uang logam Rp. 100,- | x - Keping Rp. 0 |
| Uang logam Rp. 50,- | x - Keping Rp. 0 |
| Uang logam Rp. 25,- | x - Keping <u>Rp. 0</u> |
| | Rp. 0,00,- |
| 3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan | |
| Ordonasi/SPM/SPMU/Wesel, Cek, Saldo Bank dan Materai | <u>Rp. 0,00,-</u> |
| Total Kas | Rp. 0 |
| Saldo Buku | Rp. 0 |
| Perbedaan sebesar | Rp. 0 |
| Penjelasan perbedaan : kesulitan uang kecil. | |

BENDAHARA PENGELUARAN,

LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh satu bulan desember Tahun dua ribu dua puluh satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/518/SPT/ITPROV-1.1/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021, dengan keadaan kas sebagai berikut :

1. Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan 4 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021	Rp. 22.405.144.921,-
b. Jumlah Pengeluaran 4 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021	Rp. 22.405.144.921,-
Saldo menurut buku	Rp. 0,00

2. Menurut Kas :

a. Uang tunai	Rp (319.591.695,00)
b. Saldo Bank	Rp 319.591.695,00
c. Surat-surat berharga	Rp 0,00

Saldo menurut kas

Rp 0,00

3. Selisih kurang/lebih

Rp 0,00

4. Penjelasan selisih :

TIM PEMERIKSA

BENDAHARA PENGELUARAN,


LINDA MARTINI, SP

NIP. 19680314 200012 2 003



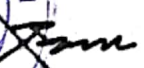
- | | | |
|---------|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Dra. Erita | () |
| NIP | : 19660704 199303 2 004 | |
| 2. Nama | : Feri Febriandi, SE | () |
| NIP | : 19820218 200903 1 003 | |
| 3. Nama | : Hj. Ellya Nurdewi, SH | () |
| NIP | : 19650511 190009 2 001 | |
| 4. Nama | : Sustini, S.Th, MPd, ME | () |
| NIP | : 19810703 200801 2 004 | |

REALISASI KEUANGAN

Bendahara Pengeluaran : LINDA MARTINI, SP
 Tahun Anggaran : 2021
 Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Jumlah Dana dalam DPA		Rp. 19.127.070.545,-
Jumlah penerimaan SP2D sampai saat pemeriksaan :		
SP2D/Tidak Langsung		
- Uang Persediaan (UP)	Rp. 400.000.000,-	
- Ganti Uang (GU)	Rp. 3.553.745.501,-	
- Tambahan Uang (TU)	Rp. 245.445.101,-	
SP2D/ Langsung		
- Gaji	Rp. 8.875.708.275,-	
- Barang/Jasa	Rp. 5.205.822.905,- (+)	
Jumlah		Rp. 18.280.721.782,-
Saldo awal		Rp. 0,00
		(+)
Jumlah dana yang tersedia		Rp. 18.280.721.782,-
Jumlah Pengeluaran sampai saat pemeriksaan :		
SP2D/Tidak Langsung		
- Uang Persediaan (UP)	Rp. 80.408.305,-	
- STS Uang Persediaan (UP)	Rp. 319.591.695,-	
- Ganti Uang (GU)	Rp. 3.553.745.501,-	
- Tambah Uang (TU)	Rp. 245.445.101,-	
SP2D/Langsung		
- Gaji	Rp. 8.875.708.275,-	
- Barang/Jasa	Rp. 5.205.822.905,-	
Jumlah		Rp. 18.280.721.782
		(-)
f. Saldo/sisa		Rp. 0,00
g. - Penerimaan lain-lain (PPN/PPH)	Rp. 86.049.147,-	
- Pengeluaran lain-lain (PPN/PPH)	Rp. 86.049.147,-	
Penerimaan yang belum disetor		Rp. 0,00
h. Saldo / saldo buku		Rp. 0,00
i. Sisa kas menurut kas opname pada tanggal pemeriksaan		Rp. 0,00
j. Selisih positif / negative		Rp. 0,00

Penjelasan Selisih :

MENGETAHUI :
 PENGGUNA ANGGARAN

 Ir. H. AMIR HASBI
 NIP. 19640406 199303 1 006

BENDAHARA PENGELUARAN


 LINDA MARTINI, SP
 NIP. 19680314 200012 2 003

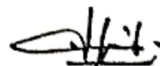
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	2.141.589,00	2.141.589,00	-
5	Mei	10.119.187,00	10.119.187,00	-
6	Juni	98.636,00	98.636,00	-
7	Juli	1.939.676,00	1.939.676,00	-
8	Agustus	1.754.546,00	1.754.546,00	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	10.617.734,00	10.617.734,00	-
11	November	1.930.326,00	1.930.326,00	-
12	Desember	7.844.184,00	7.844.184,00	-
	Jumlah	36.445.878,00	36.445.878,00	-

Jambi, 31 Desember 2021

BENDAHARA PENGELUARAN,

LINDA MARTINI, SP

NIP. 19680314 200012 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPH Final Pa 4 (2)

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-
11.	Nopember	-	-	-
12.	Desember	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN,



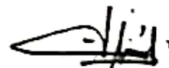
LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 23

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	1.309.360,00	1.309.360,00	-
5	Mei	402.000,00	402.000,00	-
6	Juni	160.000,00	160.000,00	-
7	Juli	269.940,00	269.940,00	-
8	Agustus	1.798.200,00	1.798.200,00	-
9	September	119.620,00	119.620,00	-
10	Oktober	177.520,00	177.520,00	-
11	Nopember	70.000,00	70.000,00	-
12	Desember	1.975.514,00	1.975.514,00	-
	Jumlah	6.282.154,00	6.282.154,00	-

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN,



LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 22

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	277.295,00	277.295,00	-
5	Mei	1.035.929,00	1.035.929,00	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	86.411,00	86.411,00	-
8	Agustus	311.955,00	311.955,00	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	976.550,00	976.550,00	-
11	November	177.049,00	177.049,00	-
12	Desember	876.926,00	876.926,00	-
	Jumlah	3.742.115,00	3.742.115,00	-

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN,


LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 21

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	5.594.500,00	5.594.500,00	-
6	Juni	2.415.500,00	2.415.500,00	-
7	Juli	3.528.500,00	3.528.500,00	-
8	Agustus	4.872.500,00	4.872.500,00	-
9	September	3.889.000,00	3.889.000,00	-
10	Oktober	843.000,00	843.000,00	-
11	Nopember	4.454.300,00	4.454.300,00	-
12	Desember	3.986.200,00	3.986.200,00	-
		9.995.500,00	9.995.500,00	-
	Jumlah	39.579.000,00	39.579.000,00	-

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN,



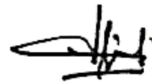
LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

REKAPITULASI BUKU KAS UMUM
PENGELUARAN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	372.015.075,00	372.015.075,00	
2	Februari	767.161.024,00	767.161.024,00	
3	Maret	980.014.863,00	980.014.863,00	
4	April	1.522.368.255,00	1.522.368.255,00	
5	Mei	2.871.424.833,00	2.871.424.833,00	
6	Jun	1.615.606.139,00	1.615.606.139,00	
7	Juli	1.587.369.577,00	1.587.369.577,00	
8	Agustus	731.295.256,00	731.295.256,00	
9	September	1.461.510.728,00	1.461.510.728,00	
10	Oktober	2.123.330.835,00	2.123.330.835,00	
11	Nopember	3.194.498.858,00	3.194.498.858,00	
12	Desember	5.178.549.478,00	5.178.549.478,00	
	Jumlah	22.405.144.921,00	22.405.144.921,00	

Jambi, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENGELUARAN,



LINDA MARTINI, SP
NIP. 19680314 200012 2 003